

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya, studi keamanan internasional telah mengalami pergeseran fokus secara signifikan, di mana terdapat aktor-aktor baru yang memperluas cakupan pembahasan tentang keamanan. Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam beberapa dekade terakhir adalah munculnya *Private Military Company* (PMC). Secara umum, PMC atau Perusahaan Militer Swasta merupakan entitas bisnis yang “memperdagangkan” jasa militer dan keamanan profesional dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik secara domestik maupun internasional (Aditya, Hardiwinoto, & Setiyono, 2017). Sedangkan menurut Musah dan Kayode Fayemi, PMC adalah perusahaan yang mengklaim dirinya dalam menawarkan “paket keamanan terintegrasi” kepada pemerintah nasional yang memiliki masalah keamanan dalam negeri yang krusial (Musah & Fayemi, 2000). Kemunculan PMC dalam studi Hubungan Internasional (HI) tidak terlepas dari pokok pembahasan kajian militer tradisional yang sangat melekat dan erat kaitannya dengan negara.

Pada era Perang Dingin, kebanyakan diskusi dan publikasi tentang keamanan didominasi oleh konsep *national security* dengan pembicaraan seputar kekuatan militer (Burhanuddin, 2017, p. 3). Kajian militer menempati posisi yang sangat penting dalam agenda keamanan hubungan internasional. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua yang ada di sektor militer harus tentang keamanan. Penggunaan fungsi militer lebih berkaitan dengan hubungan politik dan ekonomi negara-negara di dunia. Di dalam ranah militer, meskipun negara masih merupakan objek rujukan yang sangat penting, namun bukan satu-satunya aktor yang perlu dipertimbangkan (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998), melainkan terdapat aktor-aktor lain yang sama pentingnya dengan negara. Kehadiran PMC sebagai entitas non-negara,

mewakili diversifikasi penyedia layanan militer dan keamanan yang sebelumnya dianggap sebagai domain eksklusif negara (Singer, 2003).

Di sisi lain, perkembangan PMC tidak bisa dilepaskan dari fenomena tentara bayaran (*mercenaries*) yang telah eksis dalam sejarah konflik manusia jauh sebelum perusahaan keamanan modern beroperasi dan menjadi salah satu isu utama dalam politik internasional (Burhanuddin, 2017). Transformasi ini mencerminkan kontinuitas sekaligus perubahan dalam cara aktor non-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Signifikansi PMC dalam politik internasional kontemporer menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara negara, pasar, dan kekerasan terorganisir. Untuk lebih memahaminya, penting untuk melihat sebaran geografis dan variasi PMC yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Dengan memeriksa daftar beberapa PMC beserta negara basis dan wilayah operasi mereka, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana aktor-aktor non-negara ini mempengaruhi dinamika keamanan global dan mengubah lanskap politik internasional. Berikut adalah daftar beberapa PMC beserta negara basis dan operasi mereka.

Tabel 1.1. Daftar PMC dan Wilayah Operasinya di Dunia

Nama Perusahaan	Basis Kantor / Markas	Wilayah Operasi	Periode Operasi
DynCorp	Amerika Serikat	Korea Selatan, Vietnam, Kolombia, Afghanistan, Irak	1946-21 April 2021, diakuisisi oleh Amentum
Wagner Group	Rusia	Belarus, Ukraina, Syria, Sudan, Mozambik, Republik Afrika Tengah, Mali,	2014-sekarang

		Libya, Venezuela, Madagaskar	
Vinnell Corporation	Amerika Serikat	Okinawa, Taiwan, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Irak	1931-2002, diakuisisi oleh Northrop Grumman
Blackwater Security Consulting	Amerika Serikat	Irak	1997-Juni 2014
Military Professional Resources Inc. (MPRI)	Amerika Serikat	Kolombia, Angola, Senegal, Malawi, Benin, Mali, Kenya, Kroasia	1987-2012
Halliburton	Amerika Serikat	Vietnam, Diego Garcia, Irak	1919-sekarang
Sandline International	Inggris	Papua Nugini	1997-2004
Executive Outcomes (EO)	Inggris, sebelumnya Afrika Selatan	Angola, Sierra Leone, Uganda, Bostwana, Zambia, Ethiopia, Lesotho	1989-1998
Specialized Tasks, Training, Equipment and Protection	Afrika Selatan	Nigeria	2006-sekarang

(STTEP International Ltd)			
---------------------------------	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Tabel 1.1, menunjukkan secara jelas terkait pola distribusi geografis yang signifikan dalam operasi PMC. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PMC yang terlibat aktif dalam berbagai zona konflik global berasal dari Amerika Serikat. Fenomena ini menggarisbawahi dominasi perusahaan berbasis AS dalam industri keamanan swasta internasional. Secara bersamaan, informasi dalam Tabel 1.1, mengindikasikan bahwa negara-negara di benua Afrika menjadi wilayah sasaran utama untuk aktivitas operasional PMC. Dalam hal ini, terbentuk sebuah pola yang menjadikan benua Afrika sebagai “lahan yang subur” bagi eksternalisasi fungsi keamanan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik.

Dalam perkembangannya, menurut penelitian komprehensif yang dilakukan oleh Musah dan Kayode Fayemi, menjelaskan bahwa pada awal dekade 1990-an, Afrika Sub-Sahara menyaksikan pertumbuhan signifikan terkait eksistensi dari entitas keamanan non-negara. PMC dan berbagai jenis penyedia layanan keamanan swasta lainnya, seperti PSC (*Private Security Companies*), dan tentara bayaran memiliki keterkaitan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Entitas-entitas ini pada hakikatnya saling berhubungan dalam menawarkan berbagai layanan keamanan bersenjata yang luas, mencakup keterlibatan langsung dalam konflik hingga penyediaan jasa keamanan (Musah & Fayemi, 2000).

Kemudian, persesuaian terkait konteks pertumbuhan PMC diatas dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an menghadirkan tantangan besar bagi negara-negara Afrika yang baru merdeka. Situasi ini membawa dua dampak utama.

Pertama, berkurangnya ancaman perang global menyebabkan banyak negara mengurangi kekuatan militer mereka. Akibatnya, banyak senjata dan

personel militer yang tidak terpakai menjadi tersedia di pasar. Hal ini menciptakan peluang bagi munculnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa militer swasta (Lock, 1998).

Kedua, pola hubungan internasional berubah. Sebelumnya, banyak negara Afrika bergantung pada dukungan negara-negara besar (terutama AS atau Uni Soviet) untuk keamanan dan legitimasi mereka. Sistem ‘patronase’ ini berakhir seiring dengan Perang Dingin. Akibatnya, negara-negara Afrika kehilangan dukungan eksternal yang penting. Selain itu, negara-negara besar menjadi enggan terlibat langsung dalam konflik di Afrika. Hal ini diperkuat oleh kegagalan beberapa misi perdamaian PBB di Afrika pada 1990-an, seperti di Rwanda dan Somalia. Akibatnya, terjadi perubahan dalam cara negara-negara Barat terlibat dalam urusan keamanan di Afrika (Reno, 2007). Semua perubahan ini menciptakan situasi baru yang kompleks di Afrika. Negara-negara di benua ini harus menghadapi tantangan keamanan dalam kondisi di mana dukungan eksternal tradisional berkurang, sementara aktor-aktor baru seperti perusahaan militer swasta mulai bermunculan.

Menurut Adamo, fenomena keamanan swasta di Afrika harus dilihat dalam konteks krisis negara-bangsa dan melemahnya kontrol negara atas dua hal penting, yaitu monopoli kekuatan dan hak untuk menggunakan paksaan secara sah (Adamo, 2020). Hal tersebut dijelaskan oleh Mann bahwa secara historis, negara modern terbentuk melalui proses panjang di mana pemerintah secara bertahap memperoleh kemampuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan akhirnya memonopoli penggunaan kekuatan terhadap warganya (Mann, 1988). Kemampuan ini merupakan salah satu ciri utama negara modern. Namun, situasi ini telah berubah, dimana setelah Perang Dingin, muncul bentuk-bentuk peperangan baru yang berbeda dari konflik antar negara tradisional. Kaldor menyebutnya sebagai “perang baru”. Perang-perang ini melibatkan berbagai kelompok bersenjata non-negara seperti milisi dan kelompok teroris (Kaldor, 2012). Hal ini menurut Kaldor, dilatarbelakangi oleh politik identitas atau bersumber dari ketegangan sosio-politik, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu etnis dan agama. Dalam hal ini, aktor-aktor

yang terlibat memiliki kecenderungan untuk memperoleh keuntungan dari keberlanjutan kekerasan, bukan dari penyelesaiannya. Akibatnya, konflik-konflik anomik tersebut cenderung meluas dan berkepanjangan, dengan masing-masing pihak memperoleh manfaat politik atau ekonomi dari situasi kekerasan itu sendiri, bukan dari pencapaian kemenangan. Salah satu contoh nyata dari kelompok yang termasuk dalam kategori perang baru diatas adalah Boko Haram.

Boko Haram yang secara resmi bernama *Jama'atu Ahlus Sunnah Lidda'wa wal-Jihad* merupakan organisasi militan Islam yang beroperasi di Nigeria (Tampomuri, 2019). Organisasi atau kelompok ini berdiri atas dasar kepercayaan bahwa politik di utara telah dikuasai oleh sekelompok Muslim palsu yang korup (Walker, 2012). Kemunculan kelompok ini dapat diatribusikan pada ketidakpuasan terhadap pemerintah di kalangan segmen masyarakat tertentu di Nigeria. Faktor-faktor seperti keberagaman etnis dan agama, serta tingginya tingkat korupsi dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh komunitas Muslim di Nigeria berkontribusi pada munculnya gerakan insurgensi Boko Haram. Selain itu, penetrasi nilai-nilai Barat dan westernisasi di Nigeria juga menjadi katalis bagi pemberontakan kelompok ini. Dalam hal ini, Boko Haram meyakini bahwa ketidakstabilan di Nigeria bersumber dari pengaruh Barat, yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap integritas negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Goldy, 2022).

Insurgensi sendiri merupakan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang pemerintah atau kekuasaan yang berkuasa, sering kali menggunakan taktik-taktik kekerasan dan gerilya. Dalam praktiknya, antara insurgensi dan terorisme merupakan dua konsep yang sering kali tumpang tindih, tetapi memiliki perbedaan utama. Insurgensi mengacu pada pemberontakan bersenjata terorganisir yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang berkuasa atau memisahkan diri dari suatu negara. Insurgensi biasanya memiliki tujuan politik jangka panjang, basis dukungan populer, dan berupaya mengendalikan wilayah tertentu (Byman,

2007). Di sisi lain, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan terencana terhadap target non-kombatan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama tertentu (Hoffman, 2006). Teroris umumnya beroperasi secara tersembunyi dalam sel-sel kecil dan tidak berusaha menguasai wilayah, melainkan menyebarkan ketakutan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau masyarakat. Insurgensi melibatkan pertempuran berskala lebih besar melawan pasukan pemerintah, sementara terorisme cenderung melakukan serangan sporadis terhadap warga sipil atau simbol-simbol kekuasaan (Merari, 1993). Meski demikian, kelompok insurgen terkadang menggunakan taktik teror, dan organisasi teroris dapat berkembang menjadi gerakan insurgensi yang lebih luas. Dalam hal legitimasi, insurgensi sering dipandang memiliki tujuan politik yang lebih *legitimate* dibandingkan terorisme murni, meskipun keduanya sama-sama menggunakan kekerasan (Crenshaw, 2011).

Aksi insurgensi dan kekerasan yang dilakukan Boko Haram di Nigeria tertanam dalam perpecahan etnis dan agama antara wilayah selatan yang kaya minyak (mayoritas Kristen) dengan wilayah utara yang didominasi oleh pemeluk Islam. Perpecahan ini merupakan warisan dari konstruksi kolonial, dimana kebijakan separatis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial telah mempercepat tumbuhnya kesadaran etnis masyarakat Nigeria, yang semakin menguat seiring berjalannya waktu (Otoghile & Igbafe, 2014). Adanya interaksi berbagai faktor di Nigeria bagian utara, seperti keserakahan dan ketidakpuasan ekonomi, ideologi keagamaan yang ekstrem, serta peluang politik, telah membentuk konteks historis insurgensi atau pemberontakan Boko Haram terjadi (Iyekekpola, 2016). Menurut Charles & McKnight, akar penyebab insurgensi Boko Haram dapat ditelusuri dari kondisi yang serupa dengan berbagai organisasi pemberontak di Afrika, baik di tingkat regional maupun kontinental. Kondisi ini timbul akibat beberapa faktor, antara lain: lemahnya pemerintahan pusat, sistem patronase politik, tribalisme, sentimen kedaerahan, ketimpangan distribusi sumber daya lahan, serta korupsi yang

telah menjadi masalah kronis dalam kehidupan politik dan ekonomi di Afrika (Editors & McKnight, 2015).

Selain itu, kemunculan Boko Haram di Nigeria seringkali dihubungkan dengan dua peristiwa penting. Pertama, meningkatnya paham radikal di Nigeria utara setelah Revolusi Iran tahun 1979. Kedua, diberlakukannya hukum Syariah di 12 negara bagian utara Nigeria sejak tahun 1999. Meski demikian, Boko Haram sendiri baru resmi terbentuk pada tahun 2002. Kelompok ini mulai melancarkan serangan pada tahun 2010. Serangan-serangan ini terjadi setelah para anggotanya kembali ke Nigeria usai menjalani pelatihan di luar negeri. Mereka kembali dengan tujuan memerangi pihak-pihak yang mereka anggap 'kafir' (Onuoha, 2010). Dalam hal ini, meningkatnya aktivitas Boko Haram sebagai hasil dari hubungan dan penggabungan mereka dengan kelompok-kelompok teroris lain, seperti AQIM (*Al-Qaeda in the Islamic Maghreb*). Sejak saat itu, Boko Haram mengalihkan fokusnya dari salafisme lokal ke jihadisme internasional, dengan mengintensifkan serangan mereka tidak hanya di dalam negeri tetapi juga memperluas aksi mereka ke negara-negara tetangga.

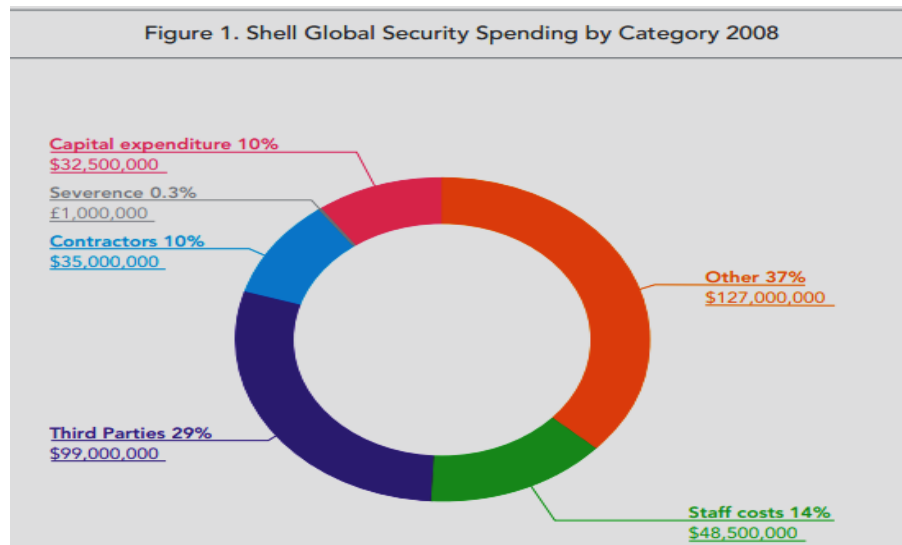
Dalam kurun waktu 2014-2015, kekerasan yang ditimbulkan oleh Boko Haram telah mengakibatkan lebih dari 15.000 korban jiwa (Adamo, 2020). Wilayah timur laut Nigeria mengalami perubahan pola serangan, ditandai dengan meningkatnya aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan, penculikan yang semakin sering terjadi, serta perluasan aktivitas Boko Haram ke negara-negara tetangga seperti Kamerun, Niger, dan Chad (Comolli, 2015). Eskalasi kekerasan Boko Haram ditandai oleh serangkaian peristiwa penting. Kelompok ini melancarkan serangan terhadap warga Kristen di utara Nigeria, menyerang kantor polisi pada pertengahan 2011, dan melakukan penyerangan terhadap markas besar PBB di Abuja pada Agustus 2011.

Namun, insiden yang menarik perhatian global terjadi pada April 2014 ketika Boko Haram menculik 276 siswi dari sekolah di Chibok. Memasuki tahun 2015, intensitas serangan Boko Haram semakin meningkat.

Aksi kekerasan kelompok ini, termasuk bom bunuh diri dan penyerangan massal, mengakibatkan ribuan kematian dan pengungsian. Dampak tidak langsung dari insurgensi Boko Haram diperkirakan telah memengaruhi hampir 2 juta orang di Nigeria. Situasi yang memburuk ini akhirnya memaksa pemerintah Nigeria untuk mendeklarasikan “keadaan darurat” di wilayah timur laut, sebagai area paling krusial terkait serangan Boko Haram (Popovski & Maiangwa, 2016).

Keadaan tersebut telah mengekspos kegagalan total Nigeria dalam menyelesaikan permasalahan internal negaranya. Sejumlah faktor, seperti respons pemerintah yang tidak memadai, dan bahkan kelemahan struktural negara Nigeria itu sendiri, telah berkontribusi pada eskalasi insurgensi Boko Haram.

Dalam konteks insurgensi non-negara dan ketidakmampuan negara untuk merespons secara efektif, Nigeria telah mengalami sejarah panjang keterlibatan aktor keamanan swasta dalam berbagai bentuk. Contohnya, pada Perang Biafra (1967-1970), kedua belah pihak yang berkonflik memanfaatkan jasa tentara bayaran tradisional. Kemudian dalam perkembangan terkini, muncul entitas keamanan swasta modern dalam bentuk Perusahaan Keamanan Swasta (PSC). Entitas ini sering dipekerjakan untuk melindungi infrastruktur energi vital, terutama mengingat maraknya pencurian minyak ilegal dan sabotase pipa berskala besar yang menjadi permasalahan krusial di Nigeria (Zabyelina & Kustova, 2015). Lebih lanjut, beberapa perusahaan multinasional telah mengadopsi pendekatan yang memanfaatkan struktur keamanan nasional yang ada. Sebagai contoh, *Shell* dan *Chevron* dilaporkan memberikan kompensasi finansial kepada militer dan kepolisian Nigeria untuk mengamankan fasilitas mereka di negara tersebut (Avant, 2004).



Gambar 1.1. Pengeluaran Keamanan Global Shell (2008)

Sumber: Shell Total Security Spend, (Platformlondon.org, 2012)

Pada Gambar 1.1, Data pengeluaran keamanan yang bocor ke Platform mengungkapkan bahwa secara global, perusahaan tersebut menghabiskan \$127 juta untuk biaya keamanan ‘lain-lain’ pada tahun 2008, yang mencakup lebih dari 40% pengeluaran keamanan Shell. Di Nigeria, Shell membelanjakan sekitar \$65 juta untuk pasukan keamanan pemerintah dan \$75 juta untuk biaya keamanan ‘lain-lain’ pada tahun 2009. Perlu dicatat bahwa ini tidak termasuk perkiraan \$200 juta dana tahunan ‘pengembangan masyarakat’ yang sering didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang mengancam operasi Shell. Shell memberikan pengeluaran dalam jumlah besar yang dihabiskan untuk keamanan di Nigeria selama periode konflik kekerasan yang intens di Delta (Amunwa, 2012, p. 6). Seperti yang tercermin dalam pengeluaran keamanan Shell, adalah contoh nyata dari fenomena global di mana ketidakmampuan aparaturnya telah mendorong peningkatan penggunaan jasa keamanan swasta. Hal ini dapat dipandang sebagai dua aspek yang saling terkait. Keduanya mencerminkan transformasi dalam karakteristik konflik kontemporer dan indikasi melemahnya otoritas negara dalam konteks keamanan.

Melihat situasi yang terjadi di Nigeria, menuju akhir masa kepemimpinan Goodluck Jonathan pada tahun 2015, negara tersebut masih

belum mampu untuk mengatasi Boko Haram. Pada akhirnya, untuk pertama kalinya pemerintah Nigeria mencoba menghubungi PMC setelah mendapatkan tekanan internasional atas kasus penculikan 276 siswi sekolah di Chibok. Pemimpin dari PMC *Specialized Tasks, Training, Equipment and Protection* (STTEP), yaitu Eeben Barlow. Pada tahun 2014, Barlow mengungkapkan bahwa presiden Goodluck Jonathan mengadakan pertemuan dengan pemimpin PMC Blackwater, yaitu Erik Prince (Barlow, 2018). Dalam pertemuan tersebut, Prince menawarkan solusi untuk menghancurkan Boko Haram dengan bayaran sebesar 1,5 milyar USD (Cole & Scahill, 2016). Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Jonathan.

Keterlibatan PMC baru terealisasi pada awal tahun 2015, ketika STTEP dikontrak untuk periode tiga bulan menjelang pemilihan umum di Nigeria (Adamo, 2020). STTEP sendiri adalah PMC yang didirikan pada tahun 2006 dan berbasis di Afrika Selatan. Perusahaan ini didirikan oleh Eeben Barlow, seorang mantan letnan kolonel di Angkatan Pertahanan Afrika Selatan dan pendiri PMC *Executive Outcomes* (EO), yang aktif beroperasi pada tahun 1990-an. Jasa yang disediakan oleh STTEP meliputi layanan konsultasi dan pelatihan di bidang militer, intelijen, dan penegakan hukum. Adapun kompetensi yang dimiliki oleh STTEP meliputi aspek-aspek kenegaraan, strategi peperangan, operasi kontra insurgensi, dan penanggulangan terorisme (STTEP International, 2009).

Dalam operasinya di Nigeria, STTEP membantu militer Nigeria dalam pembentukan unit kontra-insurgensi khusus, yang kemudian dikenal sebagai *72 Mobile Strike Force*. Selama operasi tersebut, personel STTEP diintegrasikan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Nigeria, dengan Barlow sendiri diangkat menjadi mayor jenderal (Nielsen, 2016). Kontra insurgensi (*counterinsurgency* atau COIN) merujuk pada serangkaian tindakan militer, paramiliteri, politik, ekonomi, psikologis, dan sipil yang diambil oleh pemerintah untuk mengalahkan insurgensi. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi akar penyebab ketidakpuasan yang mendorong pemberontakan, sambil secara bersamaan menghadapi ancaman keamanan

yang ditimbulkan oleh kelompok insurgen (Kilcullen, 2010). Dalam kasus ini, pemerintah Nigeria di era Goodluck Jonathan pada tahun 2015 menggunakan jasa keamanan dari PMC untuk membantu Nigeria dalam perang melawan insurgensi Boko Haram. Hal yang menarik dari kasus ini adalah bahwa penggunaan PMC di era Jonathan tersebut telah mengubah cara negara Nigeria dalam mengatasi masalah keamanan negaranya. Dalam hal ini, PMC dan berbagai jenis penyedia jasa keamanan dan militer swasta seringkali digunakan oleh para pemimpin di Nigeria untuk memperkuat kapasitas keamanan negara dan mengatasi ancaman internal yang kompleks. Penggunaan PMC oleh pemerintah Nigeria di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan pada tahun 2015 menandai adanya pergeseran signifikan dalam strategi keamanan negara tersebut, terutama dalam menghadapi ancaman insurgensi Boko Haram.

Keputusan untuk menggunakan jasa PMC mencerminkan kesadaran akan keterbatasan kapasitas militer konvensional Nigeria dalam menghadapi ancaman asimetris seperti Boko Haram. PMC dipandang mampu memberikan keahlian taktis, pelatihan, dan dukungan operasional yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pasukan keamanan Nigeria (Petersohn, 2014). Penggunaan PMC dalam konteks ini juga menunjukkan kecenderungan global yang lebih luas terhadap privatisasi keamanan, di mana negara-negara semakin mengandalkan aktor non-negara untuk memenuhi fungsi keamanan tradisional (Singer, 2008). Di Nigeria, hal ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memodernisasi dan memprofesionalkan sektor keamanan negara.

Pasca penggunaan PMC oleh Goodluck Jonathan di tahun 2015, Nigeria semakin intens menggunakan jasa PMC untuk berbagai “kepentingan keamanan”. Berakhirnya kepemimpinan Goodluck Jonathan, presiden Muhammadu Buhari awalnya menolak penggunaan perusahaan militer swasta (PMC), namun pemerintah di era Buhari hingga selanjutnya tetap menggunakan layanan PMC dalam operasi kontra insurgensi lokal, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan operasi PMC STTEP pada

tahun 2015 melawan Boko Haram. Dalam hal ini, penggunaan PMC oleh Goodluck Jonathan pada tahun 2015 telah menghadirkan pola baru bagi sektor keamanan Nigeria pada pemerintahan selanjutnya. Adapun keputusan Goodluck Jonathan dalam penggunaan PMC memiliki urgensi untuk penelitian ini agar nantinya melalui motif Goodluck Jonathan, dapat diketahui pola penggunaan PMC di Nigeria yang ternyata masih eksis hingga saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki pertanyaan kunci terkait motif dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keputusan Goodluck Jonathan dalam penggunaan PMC di tahun 2015. Untuk mengungkap motif tersebut, penelitian ini menggunakan teori Sekuritisasi yang memiliki gagasan inti bahwa keamanan adalah proses konstruksi sosial dinamis tentang kelangsungan hidup (*survival*). Proses sekuritisasi seringkali dimotivasi oleh motif kepentingan tertentu dalam penggunaan kekuasaan oleh aktor politik, di mana isu-isu keamanan dipolitisasi dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, penelitian ini ingin mengungkap dan menjelaskan kepentingan di balik penggunaan PMC dalam proses sekuritisasi Nigeria terhadap Boko Haram.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Nigeria di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan memutuskan untuk menggunakan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram pada tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum terkait penggunaan PMC di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan dalam kontra insurgensi Boko Haram di Nigeria tahun 2015.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan Nigeria di bawah pemerintahan Goodluck

Jonathan terkait penggunaan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram tahun 2015.

2. Untuk menganalisis dan mengungkap adanya motif kepentingan politik Goodluck Jonathan dalam penggunaan PMC di tahun 2015, dengan kerangka pemikiran teori Sekuritisasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

1. Memberikan kontribusi secara akademis bagi perkembangan studi Hubungan Internasional terkait topik pembahasan PMC sebagai salah satu aktor non-negara yang mempengaruhi dinamika keamanan kontemporer.
2. Untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya tentang penggunaan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram di Nigeria tahun 2015.
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penerapan teori sekuritisasi dalam menganalisis penggunaan PMC sebagai *Extraordinary Measures* dalam proses sekuritisasi isu keamanan suatu negara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang penggunaan PMC dalam isu keamanan, secara spesifik penggunaannya dalam kontra insurgensi Boko Haram di Nigeria tahun 2015.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis melakukan proses sistematis untuk mengkaji dan menemukan *research gap* dari berbagai literatur ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik di dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pengetahuan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, dan memposisikan unsur kebaruan terkait rumusan masalah dan analisis pola hubungan sebab-akibat yang digunakan pada kasus.

Literatur pertama adalah jurnal artikel Studi Afrika karya Antonino Adamo (2020), berjudul “*The Terrorist and the Mercenary: Private Warriors Against Nigeria’s Boko Haram*” yang membahas peran perusahaan militer swasta (PMC) dalam penanganan konflik kontemporer, dengan fokus pada kasus intervensi STTEP *International Ltd* terhadap Boko Haram di Nigeria pada tahun 2015. Artikel karya Adamo tersebut menggunakan perspektif neoliberalisme untuk membentuk kerangka konseptual mengenai kebangkitan keamanan swasta, termasuk PMC (Adamo, 2020). Neoliberalisme, yang menganggap pertukaran pasar sebagai panduan etis untuk semua tindakan manusia, telah menghasilkan ketergantungan yang semakin besar pada logika pasar. Hal ini menyebabkan pergeseran dari domain publik ke domain privat menjadi lebih dapat diterima, bahkan dalam masalah keamanan. Artikel tersebut berpendapat bahwa globalisasi yang didorong oleh neoliberalisme telah mengubah keamanan menjadi komoditas yang dapat dipasarkan, sehingga menciptakan “penawaran” dan “permintaan” pasar untuk kekuatan militer. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal kasus yang dibahas, yaitu intervensi PMC STTEP terhadap Boko Haram di Nigeria pada tahun 2015. Artikel karya Adamo telah memberikan penjelasan tentang peran PMC dalam konflik kontemporer melalui perspektif neoliberalisme, sedangkan penulis ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi spesifik di balik keputusan pemerintah Nigeria di bawah kepemimpinan Goodluck Jonathan untuk menggunakan jasa PMC dalam menghadapi insurgensi Boko Haram.

Kemudian, pada literatur kedua yang berjudul “*Turning the Tides of War: The Impact of Private Military and Security Companies on Nigeria’s Counterinsurgency Against Boko Haram*”, merupakan jurnal artikel *African Security Review* karya Caroline Varin (2018), yang menyelidiki peran dan dampak PMSC terhadap upaya penanggulangan pemberontakan di Nigeria selama enam bulan terakhir pemerintahan presiden Goodluck Jonathan di tahun 2015. Artikel tersebut berangkat dari wacana yang lebih luas tentang legitimasi PMSC dalam konflik internasional. Lebih lanjut dijelaskan bahwa

PMSC secara signifikan meningkatkan kemampuan operasional militer Nigeria. Operasi gabungan yang dilakukan oleh PMSC dan pasukan Nigeria menghasilkan keberhasilan yang nyata melawan Boko Haram, yaitu merebut kembali wilayah dan menyelamatkan korban sandera di Nigeria (Varin, 2018). Dalam hal ini, PMC memiliki tingkat kapabilitas yang tinggi di bidang layanan militer dan keamanan. Adanya kapabilitas ini memengaruhi kebijakan keamanan Nigeria. Nigeria memiliki kebutuhan keamanan dalam mengatasi insurgensi Boko Haram, sehingga Nigeria berusaha agar kebutuhan keamanannya terpenuhi dengan menggunakan jasa PMC. Berkaitan dengan insurgensi Boko Haram, Nigeria telah berupaya melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi situasi ketidakamanan yang terjadi. Namun, dari semua upaya yang dilakukan, Nigeria masih kesulitan untuk menumpas Boko Haram. Adanya keputusan dalam penggunaan PMC, Nigeria beralih untuk mengandalkan kekuatan eksternal dari pihak swasta. Penting untuk digarisbawahi bahwa persamaan artikel karya Caroline Varin dengan penelitian ini ialah contoh kasus penggunaan PMC oleh Nigeria pada tahun 2015 dalam melawan insurgensi Boko Haram. Sebaliknya, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan karya Caroline Varin yang terletak pada motif di balik penggunaan PMC oleh Nigeria pada tahun 2015.

Selanjutnya, literatur ketiga yang berjudul *“Private Military Companies in Africa: the Case of STTEP in Nigeria”* karya Loke Bisbjerg Nielsen (2016). Penelitian tersebut mengeksplorasi dinamika kontroversial seputar operasi STTEP, sambil menggarisbawahi kontribusi positifnya dalam upaya melawan Boko Haram (Nielsen, 2016). Dalam hal ini, fenomena PMC ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, meliputi sejarah *Executive Outcomes* (EO) dan perdebatan kontemporer mengenai legitimasi PMC di Afrika. Nielsen mengidentifikasi dua isu utama yang menjadi sumber kontroversi penggunaan PMC, yaitu peran PMC dalam operasi perdamaian dan stabilisasi di Afrika, serta implikasi etno-politik pasca-kolonial dan pasca-apartheid di era kontemporer, khususnya di Afrika Selatan. Hal ini menyoroti bahwa keberadaan PMC mencerminkan bias realis yang

memprioritaskan solusi militer di atas transformasi struktural. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsepsi Hobbesian tentang keamanan, yang menekankan absennya ancaman fisik dan legitimasi penggunaan kekuatan untuk menjamin kedaulatan. Disamping itu, Nielsen juga mengontraskan pandangan realis dengan perspektif keamanan idealis, yang menekankan negosiasi, kerjasama, dan kepentingan bersama sebagai fondasi keamanan. Argumen tersebut menyoroti hubungan intrinsik antara persepsi terhadap PMC dan pemahaman seseorang tentang legitimasi serta keamanan negara. Berbeda dengan fokus Loke Bisbjerg Nielsen pada dinamika umum PMC di Afrika, penelitian ini secara spesifik menganalisis proses Sekuritisasi terhadap motif di balik keputusan Goodluck Jonathan di Nigeria dalam penggunaan PMC pada tahun 2015. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor strategis dan politik yang mempengaruhi kebijakan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman insurgensi.

Literatur keempat, Miebaka Nabiebu dan Eni Alobu dalam artikel yang berjudul *“Exploring the Necessity of Private Military Companies in the Fight against Insurgency in Nigeria”* (2019), menyajikan analisis kritis terhadap respons Nigeria dalam menghadapi ancaman Boko Haram (Nabiebu & Alobu, 2019). Artikel tersebut mengevaluasi kegagalan Angkatan Bersenjata Nigeria dalam mengendalikan krisis, yang kemudian mendorong penggunaan Satuan Tugas Gabungan Sipil dan pemanfaatan Perusahaan Militer Swasta (PMC) sebagai alternatif strategi kontra-insurgensi. Nabiebu dan Alobu menggarisbawahi eskalasi kekerasan Boko Haram sejak 2009, yang telah menciptakan kekacauan dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya di Nigeria. Mereka menyoroti bahwa intensitas ancaman ini bahkan melebihi dampak perang saudara yang pernah dialami negara tersebut. Dalam konteks artikel tersebut, Nabiebu dan Alobu membahas implementasi keadaan darurat sebagai langkah ekstrem yang hanya diterapkan dalam situasi perang atau ancaman invasi yang nyata. Ketidakmampuan angkatan bersenjata konvensional Nigeria dalam

membendung pemberontakan Boko Haram, yang kemudian mendorong ketergantungan pada Satuan Tugas Gabungan Sipil. Situasi ini, menurut Nabiebu dan Alobu, membuka jalan bagi keterlibatan PMC dan tentara bayaran sebagai solusi potensial untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Lebih lanjut dijelaskan peran PMC dalam operasi militer ofensif, yang bertujuan untuk mengubah dinamika strategis konflik. Mereka menekankan kapabilitas PMC dalam menawarkan layanan garis depan, kemampuan tempur, dan komando langsung unit militer, yang dapat berkontribusi signifikan dalam upaya memulihkan tatanan politik dan keamanan. Nabiebu dan Alobu merekomendasikan agar pemerintah Nigeria memanfaatkan kapasitas dan potensi PMC untuk menyelesaikan insurgensi Boko Haram. Namun, mereka juga menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab pemberontakan, termasuk keterbelakangan, buta huruf, pengangguran, kemiskinan, nepotisme, kesukuan, dan korupsi, yang mereka identifikasi sebagai masalah sistemik di Nigeria. Berbeda dengan artikel karya Nabiebu dan Alobu yang berfokus pada kegagalan Nigeria dalam menangani Boko Haram dan penggunaan PMC sebagai solusi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait faktor-faktor apa saja dan menguak motif yang mendorong Nigeria untuk menggunakan PMC dalam mengatasi ancaman keamanan terkait insurgensi Boko Haram pada tahun 2015.

Literatur kelima, dalam artikel yang berjudul *“The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”* karya Thierry Balzacq dan diterbitkan oleh *European Journal of International Relations* pada tahun 2005, mengkritik dan memperluas pemahaman terkait konsep sekuritisasi yang dikembangkan oleh Sekolah Kopenhagen. Balzacq berpendapat bahwa teori sekuritisasi yang diajukan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde terlalu berfokus pada dimensi wacana (*discourse*) dan mengabaikan dimensi kontekstual serta peran aktor dalam proses sekuritisasi (Balzacq, 2005). Balzacq mengajukan tiga wajah (*faces*) dari sekuritisasi yang perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif, yaitu: Wajah Agensi Politik

(*Political Agency Face*): Balzacq menekankan pentingnya memahami strategi, taktik, dan kapabilitas aktor sekuritisasi dalam mendefinisikan ancaman dan memobilisasi audiens. Aktor tidak hanya sekadar “pembicara” (*speaker*) tapi juga “pemasar” (*salesman*) yang berusaha meyakinkan audiens. Kedua, Wajah Audiens (*Audience Face*): Balzacq mengkritik teori sekuritisasi yang terlalu berfokus pada proses wacana dan kurang memperhatikan peran audiens dalam menerima atau menolak konstruksi ancaman yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi. Audiens memiliki kapasitas untuk menerima, menantang, atau bahkan menggagalkan upaya sekuritisasi. Ketiga, Wajah Konteks (*Context Face*): Selain wacana dan aktor, Balzacq juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan politik di mana sekuritisasi berlangsung. Konteks ini dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya sekuritisasi. Artikel dari Balzacq secara garis besar mengklasifikasi tiga indikator utama dalam analisis sekuritisasi, yaitu melalui ketiga wajah sebagai pertimbangan dalam keberjalanan proses sekuritisasi. Berbeda dengan Balzacq, penelitian ini lebih menganalisis kepada motif di balik layar berjalannya proses sekuritisasi, yakni dari faktor yang mempengaruhi aktor yang melakukan sekuritisasi.

Literatur keenam, dalam artikel yang ditulis oleh McDonald (2008) yang berjudul “*Securitization and the Construction of Security*”, membahas konsep sekuritisasi dan perannya dalam konstruksi keamanan. Sekuritisasi didefinisikan sebagai proses di mana isu-isu ditransformasi menjadi isu keamanan, sehingga mengangkatnya ke level yang membutuhkan tindakan darurat dan membenarkan penggunaan kekuasaan politik luar biasa (McDonald, 2008). McDonald berpendapat bahwa sekuritisasi bukan hanya deskripsi netral dari realitas, tetapi merupakan tindakan performatif yang secara aktif mengkonstruksi dan membentuk keamanan. Dengan membingkai suatu isu sebagai ancaman keamanan, aktor-aktor dapat membenarkan penerapan kebijakan dan langkah-langkah khusus yang tidak akan layak dalam kondisi politik normal. Artikel ini mendalami landasan teoretis dari sekuritisasi, dengan berlandaskan pada Sekolah Kopenhagen dalam studi

keamanan. McDonald mengkaji bagaimana aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi, seperti pemimpin politik dan media, menggunakan strategi retorika dan wacana tertentu untuk mengkonstruksi isu-isu sebagai ancaman eksistensial. Proses sekuritisasi ini dilihat sebagai langkah politik yang memiliki implikasi signifikan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. McDonald juga membahas implikasi sekuritisasi terhadap demokrasi dan hak-hak sipil. Invokasi kepentingan keamanan dapat menyebabkan penundaan prosedur politik normal dan konsentrasi kekuasaan pengambilan keputusan di tangan beberapa aktor kunci. Hal ini berpotensi melemahkan proses-proses demokratis dan nilai-nilai, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Secara keseluruhan, artikel ini menyediakan analisis kritis terhadap proses sekuritisasi dan dampaknya terhadap konstruksi keamanan. Artikel ini juga menawarkan cara pandang tentang dinamika politik dan pergulatan kekuasaan yang terlibat dalam penentuan ancaman keamanan, serta konsekuensi dari proses ini bagi berjalannya masyarakat demokratis. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus analisis. Penelitian ini lebih melihat kepada motif kepentingan di balik proses sekuritisasi dari aktor politik yang melakukan sekuritisasi.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.2. Teori Sekuritisasi

Penelitian ini mengangkat kasus insurgensi Boko Haram di Nigeria sebagai salah satu isu keamanan yang urgen di wilayah Afrika. Secara khusus, penulis ingin berfokus pada keterlibatan *Private Military Company* (PMC) dalam upaya penanganan insurgensi tersebut pada tahun 2015, yang dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi proses legitimasi kekuatan negara dalam merespons tuntutan keamanan. Dalam perkembangan studi keamanan, paradigma konvensional yang berpusat pada kompetisi antarnegara telah lama mendominasi diskursus akademik. Perspektif

ini cenderung mereduksi konsep keamanan menjadi sekadar ancaman militer dari satu negara terhadap negara lainnya. Hal ini mengakibatkan kajian keamanan dalam disiplin hubungan internasional, mengalami stagnasi dan dianggap kurang memadai dalam menjelaskan kompleksitas dinamika global kontemporer (Rosyidin, 2020).

Adanya perluasan dalam konsep keamanan ini melahirkan teori Sekuritisasi yang dikenal sebagai *Copenhagen School*. Tiga eksponen utama dari *Copenhagen School*, yaitu Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, dalam "*Security: A New Framework for Analysis*", mempertanyakan tentang kualitas apa yang membuat sesuatu menjadi isu keamanan dalam hubungan internasional. Menurut Buzan, Wæver, Wilde (1998), keamanan dapat diartikan sebagai berikut:

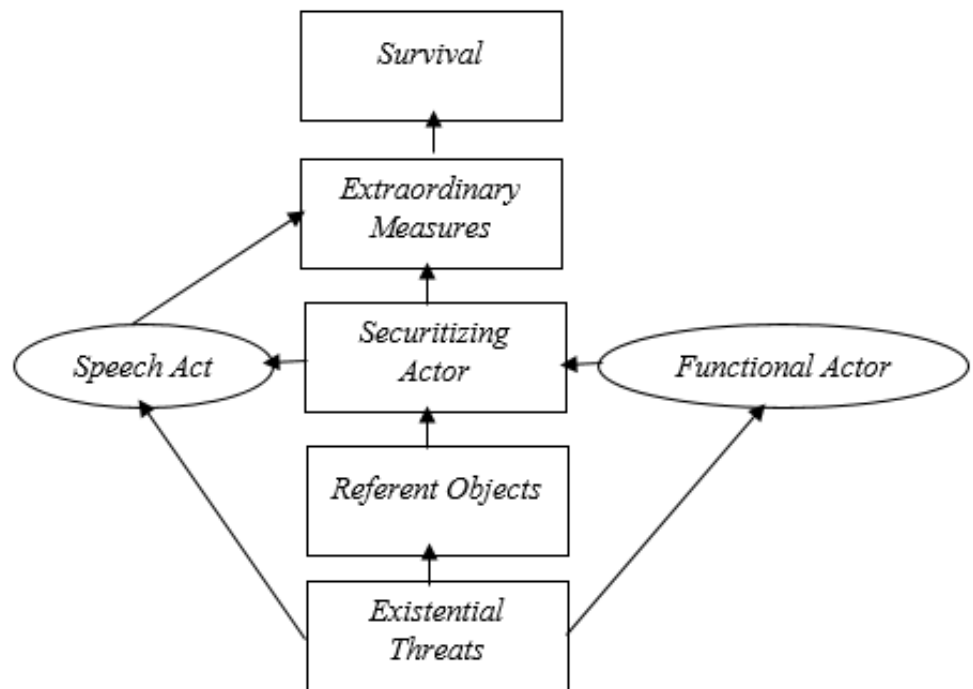
"Security is about survival. It is when an issue is presented as posing an existential threat to a designated referent object (traditionally, but not necessarily, the state, incorporating government, territory, and society)."

(Buzan, Wæver, & Wilde, 1998)

Keamanan sebagai suatu proses konstruksi sosial yang sangat dinamis, adalah tentang kelangsungan hidup (*survival*), yaitu memastikan keberlanjutan dan eksistensi objek yang dianggap penting atau vital. Gagasan ini yang kemudian diaplikasikan dalam teori Sekuritisasi, terkait bagaimana ancaman terhadap keamanan dibentuk dan diartikulasikan oleh aktor-aktor tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini, sekuritisasi adalah proses di mana suatu isu diperlakukan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan darurat dan langkah-langkah luar biasa di luar prosedur politik biasa. Menurut teori Sekuritisasi, suatu isu dapat dianggap sebagai isu keamanan ketika diangkat sebagai ancaman eksistensial

terhadap suatu *referent object* (objek yang dilindungi, misalnya negara, bangsa, atau lingkungan) oleh seorang aktor yang berwenang (seperti pemerintah atau pemimpin politik). Proses ini disebut “sekuritisasi”. Ketika sebuah isu telah berhasil disekuritisasi, isu tersebut dapat diatasi dengan cara-cara di luar prosedur normal politik, sering kali melibatkan tindakan darurat dan penggunaan kekuatan (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

Dalam kerangka teoritis sekuritisasi, terdapat tiga aktor kunci yang berperan signifikan dalam proses transformasi suatu isu menjadi ancaman keamanan. Aktor-aktor tersebut meliputi: Pertama, *Referent Objects*, yang merupakan entitas yang dipersepsikan sebagai pihak yang terancam. Kedua, *Securitizing Actor*, yaitu agen yang berperan dalam mengkonstruksi dan memproyeksikan suatu isu sebagai ancaman eksistensial. Ketiga, *Functional Actor*, yang merujuk pada pihak eksternal yang terlibat dalam proses sekuritisasi. Lebih lanjut, Buzan, Wæver, dan Wilde mengonseptualisasikan proses sekuritisasi sebagai suatu kontinum yang menempatkan isu-isu publik dalam tiga spektrum distinktif. Spektrum tersebut terdiri dari: *non-politicized*, di mana isu belum menjadi subjek perdebatan atau kebijakan publik; *politicized*, ketika isu telah masuk dalam agenda politik dan menjadi bagian dari kebijakan publik yang memerlukan alokasi sumber daya pemerintah; dan akhirnya, *to securitized*, di mana isu tersebut telah dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan darurat dan membenarkan langkah-langkah di luar prosedur politik normal, yang disebut *extraordinary measures* (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).



Gambar 1.2. Bagan Alur Berpikir Teori Sekuritisasi

Sumber: Elaborasi penulis, dalam (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998)

Dalam menganalisis penggunaan PMC oleh Nigeria pada tahun 2015, penulis mengidentifikasinya menggunakan alur berpikir teori Sekuritisasi. Berdasarkan bagan pada Gambar 1.2, Boko Haram diidentifikasi sebagai *existential threats* yang mengancam keamanan Nigeria (*referent objects*), di mana hal tersebut melibatkan negara-negara yang secara regional dan internasional (*functional actor*) secara tidak langsung memengaruhi proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria (*securitizing actor*). Dengan adanya desakan dari pihak eksternal, Nigeria di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan pada tahun 2015 melakukan tindakan ujaran (*speech act*) untuk dapat melegitimasi penggunaan PMC sebagai tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) dalam mengatasi insurgensi Boko Haram. Hal ini pada akhirnya, bertujuan untuk mencapai kepentingan *survival*, yaitu bebas dari ancaman yang dikomunikasikan sebagai masalah keamanan. Dengan demikian,

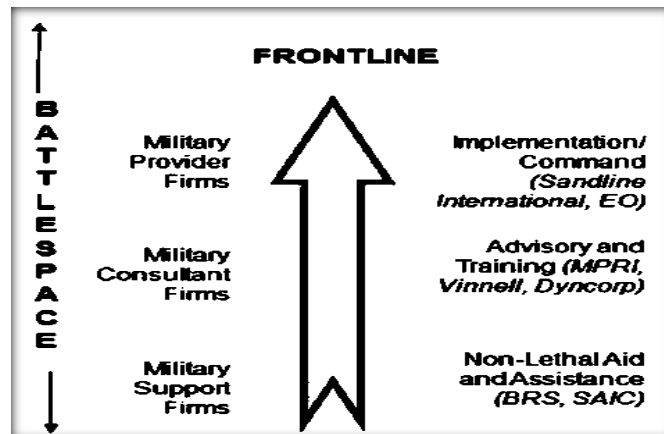
penelitian ini tidak berfokus pada proses sekuritisasi Boko Haram, yang mana sudah mencapai tahap disekuritisasi (*to securitized*) oleh pemerintah Nigeria. Namun, penelitian ini lebih menganalisis kepada bagaimana teori sekuritisasi mengidentifikasi dan mengungkap adanya motif lain selain *survival* di balik penggunaan PMC oleh Nigeria pada tahun 2015.

1.6.1. Konsep *Private Military Company* (PMC)

Peter Warren Singer (2003) dalam "*Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*" menyebutkan *Private Military Company* (PMC) sebagai entitas bisnis yang menyediakan layanan militer yang biasanya dianggap sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah. PMC adalah organisasi korporat yang berspesialisasi dalam penyediaan keterampilan militer, termasuk operasi tempur, perencanaan strategis, intelijen, penilaian risiko, dukungan operasional, pelatihan, dan keterampilan teknis (Singer, 2003).

Singer menyebut perusahaan-perusahaan ini sebagai "*Privatized Military Firms*" (PMF) dan menjelaskan bahwa mereka memadukan bentuk korporasi modern dengan fungsionalitas militer. Hal ini menciptakan perubahan signifikan dalam aturan politik dan perang internasional. PMF beroperasi secara global dan terlibat dalam berbagai konflik dan situasi transisi di seluruh dunia, menawarkan layanan kepada negara-negara berdaulat, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah. Konsep ini didukung oleh sejumlah alasan mengapa keamanan telah diprivatisasi, termasuk masalah biaya, kualitas, efisiensi, dan perubahan persepsi tentang tugas-tugas pemerintah. Singer menyoroti bahwa kehadiran PMF telah menimbulkan tantangan bagi monopoli negara atas penggunaan kekuatan militer, yang sebelumnya dianggap sebagai fungsi esensial pemerintah (Singer, 2003).

Kemudian, signifikansi PMC terletak pada kapasitas mereka untuk beroperasi baik sebagai penyedia layanan militer (kombatan) maupun intelijen (non-kombatan), yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai skenario untuk mengatasi isu-isu keamanan nasional, konflik bersenjata, dan situasi perang.



Gambar 1.3. Tipologi Ujung Tombak Singer

Sumber: (Singer, 2003)

Gambar 1.3, menjelaskan sebuah hierarki atau spektrum dari berbagai jenis perusahaan militer swasta (PMC) berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam operasi militer, yang dikenal sebagai “Battle Space” atau ruang pertempuran. Struktur ini dibagi menjadi tiga tingkatan utama, dengan panah besar menunjukkan arah menuju “Frontline” atau garis depan pertempuran. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah:

1. Di bagian bawah spektrum terdapat “*Military Support Firms*” (Perusahaan Pendukung Militer) yang berkorelasi dengan “*Non-Lethal Aid and Assistance*” (Bantuan dan Asistensi Non-Mematikan). Contoh perusahaan yang disebutkan dalam kategori ini adalah BRS dan SAIC.
2. Di tengah spektrum terdapat “*Military Consultant Firms*” (Perusahaan Konsultan Militer) yang sejajar dengan “*Advisory and Training*” (Penasehat dan Pelatihan).

Perusahaan yang disebutkan dalam kategori ini meliputi MPRI, Vinnell, dan Dyncorp.

3. Di puncak spektrum, paling dekat dengan garis depan, terdapat “*Military Provider Firms*” (Perusahaan Penyedia Layanan Militer) yang berkaitan dengan Implementasi/Komando. Contoh untuk kategori ini adalah *Sandline International* dan *Executive Outcomes* (EO).

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konsep

1. Sekuritisasi

Menurut Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) dalam “*Security: A New Framework for Analysis*”, sekuritisasi adalah proses di mana suatu isu diperlakukan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan darurat dan langkah-langkah luar biasa di luar prosedur politik biasa (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

2. Private Military Company (PMC)

P.W. Singer (2003) dalam “*Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*” menjelaskan *Private Military Company* (PMC) sebagai entitas bisnis yang menyediakan layanan militer yang biasanya dianggap sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah (Singer, 2003). PMC adalah entitas bisnis yang “memperdagangkan” jasa militer dan keamanan profesional dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik secara domestik maupun internasional (Aditya, Hardiwinoto, & Setiyono, 2017).

3. Keamanan Survival

Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) dalam “*Security: A New Framework for Analysis*” memberikan pengertian tentang keamanan sebagai suatu proses konstruksi sosial yang sangat dinamis. Keamanan adalah tentang

kelangsungan hidup (*survival*), yaitu memastikan keberlanjutan dan eksistensi objek yang dianggap penting atau vital (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

4. Insurgensi

Insurgensi atau pemberontakan adalah aktivitas politik-militer yang berkepanjangan dan diarahkan untuk sepenuhnya atau sebagian menguasai sumber daya suatu negara melalui penggunaan kekuatan militer tidak teratur dan organisasi politik ilegal. Aktivitas pemberontak, termasuk perang gerilya, terorisme, dan mobilisasi politik, seperti propaganda, perekrutan, organisasi depan dan rahasia partai, serta aktivitas internasional, dirancang untuk melemahkan kendali dan legitimasi pemerintah sambil meningkatkan kendali dan legitimasi pemberontak. Denominator umum dari sebagian besar kelompok pemberontak adalah keinginan mereka untuk menguasai wilayah tertentu. Tujuan ini membedakan kelompok pemberontak dari organisasi teroris murni, yang tujuannya tidak termasuk pembentukan pemerintahan alternatif yang mampu menguasai wilayah atau negara tertentu (Byman, 2007).

1.7.2. Definisi Operasional

1. Sekuritisasi

Sekuritisasi insurgensi Boko Haram di Nigeria mencapai puncaknya pada tahun 2015 di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan. Pemerintahan Jonathan secara konsisten menggambarkan Boko Haram sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional Nigeria. Retorika ini tercermin dalam berbagai pidato kenegaraan dan pernyataan publik, di mana Jonathan menekankan bahwa Boko Haram bukan hanya ancaman regional, tetapi juga ancaman terhadap integritas nasional Nigeria (Onapajo, 2017). Narasi ini diperkuat oleh peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk sektor keamanan. Berdasarkan data

Africa Report N°216 dalam *International Crisis Group*, pemerintah Nigeria meningkatkan anggaran pertahanan dari 100 miliar naira (\$625 juta) pada 2010 menjadi 927 miliar naira (\$6 miliar) pada 2011 dan 1 triliun naira (\$6,25 miliar) pada 2012, 2013, dan 2014, di mana sebagian besar kenaikan ini ditujukan untuk memerangi Boko Haram (*International Crisis Group*, 2014). Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat, termasuk penerapan keadaan darurat di tiga negara bagian di timur laut pada Mei 2013, yang kemudian diperpanjang hingga 2015 (Campbell, 2014). Upaya sekuritisasi Jonathan juga melibatkan dimensi internasional. Nigeria mengintensifkan kerja sama keamanan dengan negara-negara tetangga, terutama melalui pembentukan *Multinational Joint Task Force* (MNJTF) yang melibatkan Kamerun, Chad, dan Niger (International Crisis Group, 2020). Proses sekuritisasi juga berdampak pada masyarakat sipil. Pembatasan pergerakan dan penerapan jam malam di wilayah-wilayah yang terkena dampak insurgensi menjadi bukti bagaimana ancaman Boko Haram digunakan untuk membenarkan tindakan luar biasa yang membatasi kebebasan sipil (Akinola, 2015). Media juga memainkan peran penting dalam proses sekuritisasi ini. Liputan media tentang serangan Boko Haram dan respons pemerintah meningkat tajam (Ette & Joe, 2018), yang berkontribusi pada konstruksi sosial Boko Haram sebagai ancaman eksistensial. Meskipun upaya sekuritisasi ini bertujuan untuk mengatasi ancaman Boko Haram, efektivitasnya masih diperdebatkan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan yang terlalu militeristik justru dapat memperparah konflik dan mengabaikan akar penyebab insurgensi seperti kemiskinan dan marginalisasi (Onuoha F. C., 2014). Dengan demikian, sekuritisasi Nigeria terhadap insurgensi Boko Haram di bawah pemerintahan

Goodluck Jonathan pada tahun 2015 menunjukkan bagaimana suatu ancaman keamanan dapat digunakan untuk membenarkan tindakan luar biasa dan mengubah dinamika politik dan sosial suatu negara.

2. *Private Military Company (PMC)*

Dalam upaya mengatasi ancaman eksistensial Boko Haram, pemerintah Nigeria mengambil langkah signifikan dengan melibatkan jasa keamanan swasta internasional. Pada Maret 2015, Goodluck Jonathan dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa dirinya telah secara resmi mengontrak PMC untuk mendukung kontra insurgensi Angkatan Darat Nigeria melawan Boko Haram (Cropley & Lewis, 2015). Secara spesifik, Nigeria menjalin kontrak dengan *Specialized Tasks, Training, Equipment and Protection International (STTEP)*, sebuah *Private Military Company (PMC)* yang berbasis di Afrika Selatan. Tujuan utama dari kontrak tersebut adalah untuk membantu militer Nigeria dalam pengembangan dan pelatihan unit khusus yang difokuskan pada operasi kontra-insurgensi melawan Boko Haram. Hasil dari kolaborasi ini adalah terbentuknya unit pasukan yang kemudian dikenal sebagai *72 Mobile Strike Force*. Unit pasukan ini dirancang untuk menjadi ujung tombak dalam strategi Nigeria untuk menekan dan mengatasi ancaman Boko Haram yang semakin meningkat (Nielsen, 2016). Keterlibatan STTEP dalam upaya kontra-insurgensi Boko Haram tersebut dikonfirmasi langsung oleh Eeben Barlow, ketua STTEP. Menurut pernyataan Barlow, kontrak antara STTEP dan pemerintah Nigeria ditandatangani pada pertengahan Desember 2014. Selanjutnya, STTEP mulai menjalankan operasinya di Nigeria pada Januari 2015 (Murphy, 2015).

3. *Keamanan Survival*

Penelitian ini mengangkat insurgensi Boko Haram di Nigeria sebagai salah satu masalah keamanan yang urgen di wilayah Afrika. Dalam konteks ini, konsep keamanan “*survival*” menjadi relevan, merujuk pada tindakan-tindakan darurat yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan warganya dalam menghadapi ancaman eksistensial yang serius. Urgensi keamanan ini tercermin dalam keputusan Presiden Goodluck Jonathan pada tahun 2015 untuk menggunakan jasa PMC, sebuah langkah yang mengindikasikan keterbatasan kapabilitas militer Nigeria dalam menangani eskalasi ancaman Boko Haram. Sejak dimulainya pemberontakan pada Juli 2009, Boko Haram semakin menarik perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aksi kekerasan melalui beberapa serangan berbahaya yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Dimulai dari serangan pada 26 Agustus 2011, di mana Boko Haram melakukan serangan bom bunuh diri terhadap kantor UNDP di Abuja, ibu kota Nigeria. Serangan ini menjadi salah satu serangan internasional pertama Boko Haram (Phalnikar, 2011). Kemudian hal ini berlanjut hingga April 2014, kelompok ini menculik 276 siswi dari Chibok, sebuah penculikan yang dengan cepat menjadi terkenal di seluruh dunia (Popovski & Maiangwa, 2016). Secara garis besar, penggunaan PMC oleh Nigeria dalam mengatasi Boko Haram, telah menunjukkan adanya kebutuhan keamanan yang mendesak untuk tujuan *survival*.

4. Insurgensi

Insurgensi Boko Haram di Nigeria bermula pada Juli 2009, ketika kelompok militan Islamis dan jihadis Boko Haram memulai pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Nigeria (BBC, 2016). Konflik ini terjadi dalam konteks permasalahan jangka panjang kekerasan religius antara komunitas Muslim dan Kristen di Nigeria, dengan tujuan akhir kaum pemberontak untuk

mendirikan negara Islam di wilayah tersebut. Setelah bertahun-tahun menentang dan melawan kubu Pemerintah, Boko Haram menunjukkan peningkatan agresivitas dan mulai menguasai wilayah-wilayah luas di Nigeria bagian timur laut. Eskalasi kekerasan mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan tercatatnya 10.849 kematian, bersamaan dengan ekspansi teritorial Boko Haram yang signifikan (Hughes, 2014). Pada periode yang sama, insurgensi ini menyebar ke negara-negara tetangga, termasuk Kamerun, Chad, Mali, dan Niger, sehingga berkembang menjadi konflik regional yang substansial di kawasan Sub-Sahara Afrika.

1.8. Argumen Penelitian

Penggunaan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram di Nigeria menunjukkan adanya motif kepentingan politik Goodluck Jonathan pada tahun 2015. Dalam proses sekuritisasi, aksi-aksi insurgensi Boko Haram yang sangat destruktif bagi kondisi keamanan dan kedaulatan Nigeria, merupakan ancaman eksistensial yang berbahaya bagi kelangsungan hidup Nigeria sebagai objek yang terancam dan harus dilindungi. Di sisi lain, adanya berbagai tekanan dari sisi domestik bahkan internasional terhadap masalah Boko Haram, maka Goodluck Jonathan sebagai aktor sekuritisasi melakukan tindakan ujaran keamanan untuk melegitimasi penggunaan PMC sebagai tindakan luar biasa dalam mengatasi insurgensi Boko Haram. Dalam hal ini, penggunaan PMC disebabkan oleh proses sekuritisasi yang bertujuan untuk mencapai konteks keamanan *survival* yang didorong oleh motif kepentingan dari aktor yang melakukan sekuritisasi. Melalui motif kepentingan politik Goodluck Jonathan, terciptalah sebuah pola baru pada pemerintah selanjutnya untuk menggunakan dan memanfaatkan layanan PMC sebagai pemenuhan kebutuhan keamanan Nigeria.

1.9. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang lebih menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data. Menurut (Dean 2013; Hammersley, 2013), penelitian kualitatif juga dipahami sebagai serangkaian sikap dan strategi untuk melakukan inkuiri yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana manusia memahami, mengalami, menafsirkan, dan mengonstruksi realitas sosial. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dengan baik mengapa *Private Military Company* (PMC) digunakan dalam upaya melawan insurgensi Boko Haram di Nigeria pada tahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menyajikan pemahaman dan mengungkap secara objektif terkait informasi, fakta dan data yang relevan tentang penggunaan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram di Nigeria tahun 2015.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu mencoba untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu permasalahan dalam penelitian dapat terjadi. Terkait penggunaan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram pada tahun 2015, penulis berusaha menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang mengacu pada teori Sekuritisasi. Variabel yang dimaksud di dalam teori ini adalah ancaman eksistensial (*existential threats*), objek rujukan atas ancaman (*referent objects*), aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), tindakan luar biasa (*extraordinary measures*), dan keamanan tentang kelangsungan hidup (*survival*). Variabel yang ada di teori ini akan dianalisis untuk menemukan adanya hubungan keterkaitan antar variabel yang menyebabkan Nigeria memutuskan untuk menggunakan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram pada tahun 2015. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan konsep PMC sebagai salah satu indikator utama dalam proses sekuritisasi.

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu penulis hanya melakukan pengamatan dan riset melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram di Nigeria.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa: teks, kata-kata tertulis, dan kalimat atau frasa yang menggambarkan, menjelaskan, serta mendukung kasus atau fenomena yang sedang diteliti.

1.9.5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan media berita, serta sumber sekunder lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara *desk research* (metode studi kepustakaan), yaitu melalui buku-buku bacaan, artikel jurnal penelitian, referensi informasi dan data berbasis internet, serta dokumen dan arsip penelitian yang relevan.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data-data yang diperoleh melalui buku-buku, skripsi, artikel jurnal, hingga berita di internet akan dianalisis secara kualitatif, dan menggunakan teori untuk menjelaskan keterkaitan antar masing-masing variabel.

1.9.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dalam proses perolehan data, penelitian ini tetap memperhatikan bagaimana data-data yang dikumpulkan memiliki

nilai historis yang melekat sebagai kriteria dalam memahami suatu fenomena/peristiwa, perkembangan yang relevan, serta menjadi dasar sebagai pedoman dalam proses penelitian ini.

1.10. Sistematika Penelitian

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dibagi dan disusun atas empat bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan desain penelitian sebagai fondasi, yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, dan metode penelitian.

BAB II. PENGGUNAAN PMC DI BAWAH PEMERINTAHAN GOODLUCK JONATHAN DALAM KONTRA INSURGENSI BOKO HARAM DI NIGERIA

Bab ini merupakan deskripsi kontekstual penelitian, yang menjelaskan mengenai penggunaan PMC di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan dalam kontra insurgensi Boko Haram di Nigeria.

BAB III. ANALISIS SEKURITISASI TERHADAP PENGGUNAAN PMC DALAM KONTRA INSURGENSI BOKO HARAM DI NIGERIA

Bab ini berisi analisis teori Sekuritisasi dalam mengungkap mengapa Nigeria di bawah pemerintahan Goodluck Jonathan memutuskan untuk menggunakan PMC dalam kontra insurgensi Boko Haram pada tahun 2015.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran sebagai implikasi praktis dari temuan atau hasil yang diperoleh.